

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA MOLOMPAR
KECAMATAN TOMBATU TIMUR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.**

APRILITA LAURENTINA ROGAHANG

FEMMY M. G. TULUSAN

NOVIE R. A. PALAR

aprilitalaurentinarogahang@gmail.com

ABSTRACT

the purpose of this study was to find out the Reality of Poverty Alleviation Policy Implementation in Molompar Village, East Tombatu District, Southeast Minahasa Regency. This study uses a qualitative method that is descriptive. In every formulation of a policy (program) is always accompanied by an implementation. Where Implementation is a series of activities in order to deliver policies to the community so that these policies can bring results as expected. Overall the implementation of poverty alleviation policies in Molompar Village, East Tombatu District, Southeast Minahasa Regency is still not good and not optimal based on research results obtained through observation data collection, interviews, and poverty alleviation policy documentation studies assessed using 4 indicators including Communication, resources, dispositions, and bureaucratic structures where there are still many people who do not want to use resources to innovate, in order to produce products or businesses, communication that still experiences errors every time implementing policies, bureaucratic structures that are still not efficient and the attitudes of policy implementers are lacking Good.

Keywords : Implementation, Policy, Poverty

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Realitas Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Desa Molompar Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam setiap perumusan suatu kebijakan (program) selalu dibarengi dengan implementasi. Dimana Implementasi merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka penyampaian kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut dapat membawa hasil seperti yang diharapkan. Secara keseluruhan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Desa Molompar Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara masih belum baik dan belum optimal berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi pengumpulan data, wawancara, dan studi dokumentasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang dinilai menggunakan 4 indikator diantaranya Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dimana masih banyak masyarakat yang tidak mau menggunakan sumber daya untuk berinovasi, guna menghasilkan produk atau usaha, komunikasi yang masih mengalami kesalahan setiap kali melaksanakan kebijakan, struktur birokrasi yang masih belum efisien dan sikap pelaksana kebijakan kurang Baik.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Pemahaman mengenai implementasi sebagai suatu tahap untuk memastikan terlaksananya dan tercapainya tujuan-tujuan dari suatu kebijakan adalah hal yang biasa dipahami oleh perencana dan pengambil keputusan. Begitu juga dengan implementasi yang berhubungan dengan kebijakan pengentasan kemiskinan. Dalam setiap perumusan suatu kebijakan (program) selalu diiringi dengan suatu implementasi. Implementasi bukan hanya sekedar sangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, tetapi lebih dari pada itu. Implementasi juga merupakan sebuah rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang telah diharapkan. Layaknya implementasi kebijakan dan program pemerintah yang ada pada umumnya, banyak sekali permasalahan atau hambatan yang terjadi dan sangat bervariasi, seperti yang kita ketahui salah satu permasalahan dan hambatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah kemiskinan. Kita harus sadar dimana berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, tetapi demikian, masalah kemiskinan belum bisa diatasi secara tuntas. Kemiskinan adalah salah satu masalah yang telah lama ada. biasanya ketika orang berbincang mengenai kemiskinan, maka yang dimaksud ialah kemiskinan material, dimana orang maupun kelompok masyarakat tidak sanggup mencukupi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak, itulah yang dikatakan sebagai kemiskinan konsumsi. beberapa peneliti menyatakan bahwa kemiskinan hanyalah bagian dari sisi pemenuhan konsumsi saja, akan tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Memang benar pernyataan ini bermanfaat dan

akan selalu dipakai untuk mengukur kemajuan tingkat kesejahteraan, tetapi pernyataan tersebut sangat tidak memadai karena :

1. Tidak berkaitan dengan definisi kemiskinan yang dimaksud oleh orang miskin itu sendiri, juga tidak cukup untuk memahami kemiskinan yang sesungguhnya.
2. Bisa mendorong pada kesimpulan yang salah dimana mengatasi kemiskinan cukup dengan menyiapkan bahan makanan yang memadai.

Dari ukuran-ukuran kehidupan modern saat ini banyak warga yang tidak menikmati sarana pembelajaran, pelayanan kesehatan, serta kemudahan- kemudahan lain yang ada pada era modern ini. Pemicu kemiskinan memiliki perbandingan di tiap daerah perkotaan ataupun pedesaan. Salah satu contohnya yakni karena malas untuk bekerja ataupun sengaja untuk dimiskinkan. Sesungguhnya warga menjadi malas karena ketidakcocokan pekerjaan tersebut untuk mereka lakukan. Kemiskinan sendiri menjadi pokok kasus di Indonesia, sementara itu jika dilihat dari kekayaan alam kita, Indonesia sangat tidak pantas mempunyai rakyat yang begitu banyak menderita akibat kemiskinan. Kemiskinan sendiri muncul disebabkan terdapatnya ketidakadilan dalam kepemilikan aspek produksi, ialah karena kemiskinan terpaut dengan perilaku, budaya hidup serta lingkungan dalam suatu masyarakat. Realitas menampilkan kalau kemiskinan bukan hanya berhubungan dengan ketidakberdayaan dalam mencukupi kebutuhan material dasar, namun kemiskinan pula terpaut erat dengan bermacam-macam dimensi kehidupan manusia contohnya kesehatan, pembelajaran, jaminan masa depan serta peranan sosial. Oleh sebab itu, kemiskinan hanya bisa dimengerti secara utuh apabila ukuran lain dari kehidupan manusia diperhitungkan. Ada banyak

penyebab kemiskinan akan tetapi tidak ada satu jawaban yang bisa menjelaskan semuanya sekaligus. Kemiskinan sudah ada sejak lama, Praktek perdagangan dan pajak yang membagi keuntungan dengan penjajah selama 350 tahun penjajahan Belanda berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia. Pada tahun 1920-an terjadi manajemen ekonomi yang sangat buruk dan penurunan harga ekspor, yang menyebabkan tingkat pertumbuhan terendah dan pertumbuhan paling pro-kaum miskin dalam sejarah ekonomi Indonesia. (Dadang Solihin 2014 : 4)

Kemiskinan memang sudah hadir sejak lama, namun gejalanya terus bertambah sesuai dengan kompleksnya kesulitan yang masih dihadapi bangsa Indonesia hingga saat ini. Hal ini juga karena Indonesia merupakan salah satu negara yang taraf hidup warganya masih sangat jauh tertinggal dari negara maju. Perkara kemiskinan menggambarkan permasalahan lingkungan yang bersifat kompleks dan multidimensional yang berhubungan dengan aspek sosial, budaya, ekonomi serta lain sebagainya. Tuntutan global dalam proses mensejahterakan warga oleh pemerintah masih menjadi pekerjaan rumah yang luar biasa. Jumlah orang miskin tidak seluruhnya menurun, terlebih lagi kemiskinan bisa digambarkan telah menghambat hak-hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, jaminan kesehatan, dan kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di Indonesia, yang telah terwujud dalam salah satu kasus. Di Indonesia sendiri, kemiskinan masih menjadi salah satu masalah mendasar yang dihadapi pemerintah, meskipun berbagai program telah berjalan sesuai harapan. Terlepas dari bermacam kemajuan pembangunan infrastruktur yang sudah dicapai pemerintah, kemiskinan masih senantiasa menjadi permasalahan krusial serta moral yang belum pula terselesaikan.

Kebijakan program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan warga selama ini dengan alokasi pembiayaan yang besar, baik dari pemerintah pusat ataupun wilayah, nyatanya belum memegang pangkal kasus dari kemiskinan(Wardis Girsang 2011:9)

Persoalan kemiskinan ini bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase dari penduduk miskin. Di sisi lain yang patut diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus berupaya memperkecil kuantitas masyarakat miskin, Dengan jumlah penduduk lebih dari 255 juta jiwa, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, dan memiliki beragam budaya dan strata sosial ekonomi, menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian, Indonesia sensitif terhadap isu-isu ekonomi yang memiliki pengaruh langsung terhadap kemiskinan. (BPS: 2015). Isu mengenai kemiskinan ialah isu yang utama dan serius buat semua rencana kebijakan pemerintah pusat ataupun daerah. Karena wilayah Indonesia separuh besar tugas rumahnya ialah dengan cara apa mengecilkan angka kemiskinan, pengangguran, dan dengan cara apa mengecilkan tingkat kecanduan sumber daya manusia terhadap negara. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai salah satu tujuannya. Seperti amanat dari Pembukaan Undang Undang Dasar Negara RI 1945 dan penjelasan bab didalamnya, pemerintah juga telah menciptakan UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dimana di dalam Pasal 19 dan 20 khusus membicarakan mengenai pengentasan kemiskinan. Persoalan kemiskinan, harus diselesaikan bersama, baik dari pemerintah ataupun masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus saling bekerjasama dalam mengentaskan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan membutuhkan keterpaduan antar kebijakan rencana yang terpecah diberbagai sektor.

Tidak hanya upaya pengentasan kemiskinan secara nasional, akan tetapi usaha ini juga bisa dilakukan oleh provinsi dan daerah. Upaya pengentasan kemiskinan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengecilkan jumlah penduduk miskin dalam rangka memajukan derajat kesejahteraan rakyat.

Usaha pengentasan kemiskinan di Indonesia dilandasi oleh beberapa landasan hukum yang mengatur agar kemiskinan di Indonesia tidak semakin parah, antara lain sebagai berikut : UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin. Selanjutnya pada setiap provinsi dan kabupaten/kota harus memiliki wewenang untuk berusaha mengatasi permasalahan kemiskinan di daerahnya sesuai dengan kondisi yang ada antara lain adalah keseriusan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menanggulangi kemiskinan di Minahasa Tenggara khususnya di Desa Molompar Kecamatan Tombatu Timur, Dalam rangka meminimalisir permasalahan kesejahteraan di Desa Molompar Kecamatan Tombatu Timur, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melalui Dinas Sosial menggunakan berbagai program untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Dikarenakan ini merupakan masalah yang mendesak dan membutuhkan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, untuk itu pemerintah membuat kebijakan program agar terciptanya masyarakat yang sejahtera. Usaha mengembangkan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengecilkan beban dan mencukupi

hak-hak dasar masyarakat Desa Molompar secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat yang berdasarkan peraturan-peraturan Presiden Republik Indonesia No 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan melalui inisiatif yang langsung menguntungkan masyarakat kurang mampu agar daerah tersebut dapat segera menurunkan angka kemiskinannya. Pemerintah dituntut oleh persoalan kemiskinan untuk bertindak cepat dan tegas untuk mengatasinya, menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama dalam melaksanakan rencana pembangunan negara. Pengurangan kemiskinan bertujuan untuk menurunkan jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan menghentikan munculnya kasus-kasus kemiskinan baru. Untuk itu pemerintah menetapkan beberapa program yang akan disalurkan untuk menangani pengentasan kemiskinan di Desa Molompar Kecamatan Tombatu Timur, antara lain; Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Jumlah masyarakat miskin/kurang mampu di Desa Molompar sebagai penerima bantuan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebanyak 74 keluarga. Berdasarkan data tersebut kemudian mendorong Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara untuk melakukan verifikasi dan pemuktahiran data dan melakukan sosialisasi secara intensif kepada para penerima program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagaimana yang tertulis dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Meskipun seringkali terjadi berbagai permasalahan

dalam program yang disalurkan tersebut sehingga dapat dinilai bahwa program yang dijalankan tersebut belum sepenuhnya efektif. (Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara).

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

1. Rizky Faiz Kinontoa, Johnny Posumah & Novva Plangiten (2022) dengan judul “Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Bolangitan Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja masyarakat dalam program pemberdayaan di Kecamatan Bolangitan Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Alih-alih menggunakan eksperimen, metode penelitian kualitatif digunakan untuk mempelajari kondisi objek alami, dengan peneliti berfungsi sebagai alat utama, menerangi sumber informasi dengan cara yang bertujuan dan bola salju, triangulasi teknik pengumpulan data, menggunakan analisis informasi induktif/kualitatif, dan menekankan pemaknaan yang berlebihan dalam temuan penelitian. Dan hasil dari penelitian ini yaitu :

- a. Dimensi “Kesejahteraan” cukup baik, itu berarti program pemberdayaan masyarakat memberikan manfaat/kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun belum optimal.
- b. Dimensi “Akses” cukup baik, itu berarti bahwa program pemberdayaan masyarakat memberikan kontribusi/manfaat bagi peningkatan kesetaraan akses terhadap sumber daya seperti informasi, pelatih keterampilan usaha, kemudahan memperoleh kredit usaha kecil namun belum optimal.

- c. Dimensi “Kesadaran kritis” cukup baik, itu berarti pemberdayaan masyarakat desa pada program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peningkatan kesejahteraan, namun belum optimal.
- d. Dimensi “Partisipasi” cukup baik, itu berarti pemberdayaan masyarakat desa pada program ini bisa mengembangkan partisipasi masyarakat dalam kelembagaan desa, dan partisipasi dalam desaa berkembang, namun belum optimal.
- e. Dimensi “Kontrol” cukup baik, ini berarti bahwa program pemberdayaan masyarakat bisa meningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan dalam mengendalikan dan mengelola sumber daya mereka, tetapi mereka tidak optimal.

2. Herty Pono, F. D. J. Lengkong, Novie Palar (2022) dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Apulea Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat di Desa Apulea. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mengambil latar belakang di Desa Apulea. Hasil dari penelitian ini dimulai dengan pemerintah menyampaikan tujuan dari perencanaan pembangunan dan motivasi bagi masyarakat, penyajian informasi, serta evaluasi masyarakat. Berdasarkan sumber dan pembahasan bisa disimpulkan kalau komunitas partisipasi dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Apulea, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera ialah bagian dari proses partisipasi dalam pengambilan keputusan selaku aspek kedatangan di rapat rencana pembangunan, membagikan ide/gagasan ataupun komentar

dalam rapat perencanaan pembangunan serta menyetujui ataupun menolak hasil keputusan rencana pembangunan.

3. Laurencia G. Ajawaila, Welson Y. Rompas, Femmy M. G. Tulus (2021) dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan perkembangan perekonomian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian ini lebih memprioritaskan proses dari pada hasil, maksudnya saat mengumpulkan informasi lebih memprioritaskan hasil dan akibat dari variabel yang saling mempengaruhi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penanda input ialah sumber energi pendukung serta bahan-bahan yang diperlukan yang terdapat di Kecamatan Tobelo dapat dikatakan cukup mencukupi dalam menunjang penerapan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Tobelo.
- b. Penerapan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Tobelo sendiri dibagi kepada sebagian program pembangunan yang dibedakan dari pelaksana serta sumber penganggaran pembangunan
- c. Hambatan yang kerap kali terjalin pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Tobelo yaitu dimana kerap kali pembangunan dilakukan di atas tanah kepunyaan warga sehingga bisa memakan waktu yang lumayan lama untuk pemerintah kecamatan maupun desa buat melaksanakan musyawarah maupun perundingan supaya warga bisa membagikan tanah mereka buat

kepentingan mereka serta pula kepentingan umum di Kecamatan Tobelo.

- d. Akibat dari terdapatnya pembangunan infrastruktur di Kecamatan Tobelo ialah aktivitas tiap hari warga di tiap-tiap desa akan lebih efektif dari segi waktu sebab bisa menempuh perjalanan yang lebih cepat bila dibanding dengan saat sebelum terdapatnya pembangunan infrastruktur.
- e. Sesuai dengan hasil riset tentang pembangunan infrastruktur Kecamatan Tobelo dalam hubungannya dengan hasil dari pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur diketahui bahwa pencapaian target program pembangunan infrastruktur di Kecamatan Tobelo pada umumnya telah capai sasaran yang telah ditentukan dan direncanakan.

4. Rezaldy tumbel, Burhanuddin kiyai, Rully Mambo (2021) dengan Judul “Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apa saja dampak dari Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Diketahui Hasil dari penelitian ini kurang tepat sasaran dalam proses pendataan penerima program Bantuan Langsung Tunai, sehingga masih ada saja masyarakat yang kurang mampu dan tidak terdampak dalam kebijakan tersebut. Kesadaran masyarakat penerima bantuan sangat di perlukan agar dana yang di peroleh dari program BLT dapat sedikit membantu kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah juga patut meninjau

kembali permasalahan public yang sering terjadi ketika program BLT sedang berlangsung, sehingga program BLT bisa terealisasi secara optimal kepada masyarakat setempat.

KONSEP TEORI

Konsep Kebijakan Publik

Orang-orang Yunani dan Romawi meminjam gagasan publik dan swasta dari mana dasar-dasar kebijakan publik diturunkan. Kedua konsep tersebut didefinisikan oleh orang Romawi sebagai Res Publica dan Res Privata. Ungkapan Konion (yang berarti publik) dan Idion (yang berarti pribadi) digunakan di Yunani kuno untuk menggambarkan gagasan publik dan pribadi. Sejarah ajaran dalam kebijakan publik dengan demikian dapat ditelusuri kembali ke abad ke-18 SM, di bawah kekuasaan Babel, dan dikenal sebagai kode Hammurabi. Pada saat Babilonia berkembang dari negara-kota kecil menjadi wilayah yang luas, kode ini menunjukkan keinginan untuk membangun tatanan publik yang bersatu dan adil (Fermana, 2009: 30-31). Frasa “Kebijakan” dan “Publik” dapat dipahami dengan melihat definisi kebijakan publik yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber literatur. Kebijakan publik menyelidiki isu-isu dan konstruksi, interpretasi, dan penempatan masalah ini pada agenda politik dan kebijakan. Kebijakan publik menurut Eston (Tangkilisan, 2003:2) diartikan sebagai alokasi kekuasaan dan nilai bagi semua individu yang keberadaannya wajib, sehingga hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan atas nama masyarakat. Tindakan ini berupa sesuatu yang telah dipilih oleh pemerintah, yaitu pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Sementara itu, Anderson (Abidin, 2012:22) memberikan penjelasan mengenai apa itu kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Setiap kebijakan harus memiliki tujuan tertentu; itu tidak bisa diciptakan begitu saja karena ada kesempatan untuk melakukannya. Tidak akan ada kebijakan tanpa tujuan.
- b. Suatu kebijakan terikat dengan kebijakan lain dalam masyarakat yang ditujukan untuk implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum; itu tidak ada dalam ruang hampa atau terisolasi dari kebijakan lain.
- c. Kebijakan adalah apa yang diimplementasikan pemerintah, bukan apa yang masih diinginkan atau ingin dicapai.
- d. Kebijakan dapat berupa anjuran atau saran, maupun negatif atau restriktif.
- e. Kebijakan Hukum harus menjadi landasan kebijakan agar mereka memiliki kekuatan untuk memaksa kepatuhan.

Tahap-tahap Kebijakan Publik

1. Tahap Penyusunan Agenda

Sebelumnya masalah-masalah yang akan diatasi akan berkompetisi terlebih dahulu agar bisa masuk ke dalam agenda kebijakan. Dan pada akhirnya ada beberapa masalah yang berhasil masuk ke dalam catatan para perumus kebijakan. dalam tahap ini beberapa masalah bisa saja belum tersentuh sama sekali, sementara permasalahan lainnya ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada juga permasalahan dikarenakan alasan tertentu yang tertunda dengan waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Permasalahan yang sudah ada ke dalam catatan kebijakan lalu di diskusikan oleh para pencipta kebijakan. Permasalahan itu di definisikan lalu bersama-sama mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut. Sama artinya dengan perjuangan suatu

permasalahan agar bisa ada ke dalam catatan kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif kemudian bersaing untuk bisa terpilih sebagai kebijakan yang diambil agar bisa memecahkan permasalahan. dalam tahapan tersebut, masing-masing sektor akan “bermain” agar dapat mengusulkan pemecahan permasalahan terbaik

Konsep Implementasi Kebijakan

Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara sederhana implementasi Kebijakan bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi, menurut Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7), “merupakan perluasan kegiatan yang menyesuaikan satu sama lain”. Implementasi, menurut Syauckani et al (2004:295), adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk mengeluarkan kebijakan kepada publik sehingga menghasilkan keluaran yang diinginkan. Sukses tugas memerlukan:

- a. Persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang adalah interpretasi dari kebijakan itu sendiri.
- b. Mempersiapkan sumber daya untuk menjalankan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab menjalankan kebijaksanaan itu.
- c. Bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara konkrit kepada masyarakat.

Surmayadi (2005 : 79) mengatakan terdapat 3 faktor utama dalam proses implementasi yaitu:

- a. terdapatnya kegiatan ataupun kebijakan yang dilakukan.
- b. sasaran group ialah kelompok masyarakat yang jadi tujuan serta di sahkan hendak menerima khasiat dari kegiatan, pergantian ataupun kenaikan.

- c. faktor pelaksana (Implementor), yang dapat berupa kelompok orang atau organisasi, bertugas mengawasi proses pelaksanaan.

Setelah tahapan pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan merupakan langkah selanjutnya dalam proses tersebut. serta di dalam penerapannya ada cara-cara yang wajib dicermati. Nugroho (2014 : 243) merumuskannya menjadi 3 cara dengan maksud supaya implementasi bisa sukses saat sebelum mulai mengimplementasikannya. cara tersebut ialah:

- a. Penerimaan kebijakan. Uraian publik dimana kebijakan merupakan “ketentuan game” .untuk mengelola .masa .depan. spesial .pengimplementasi .kebijaksanaan .semacam birokrat, menguasai kalau .kebijaksanaan hendaknya .dilaksanakan .dengan .baik, bukan .sebagai .keistimewaan.
- b. Adopsi kebijakan. Sebagai “aturan main” untuk mengatur masa depan, masyarakat menerima dan mendukung kebijakan tersebut. Jenis birokrat tertentu mengawasi implementasi kebijakan yang benar, bukan hanya sebagai hak istimewa.
- c. Kesiapan Strategis. Masyarakat siap terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, dan pejabat siap mengambil peran utama; ini benar bahkan jika tugasnya adalah menggunakan kebijaksanaan

Model Implementasi Kebijakan

1. Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Sabatier dan Mazmanian (Suratman 2017: 99-100).

Tingkatkan pemasaran dan efektivitas pendekatan kontrol. Dia percaya bahwa karena pendekatan kebijakan bertahap membagi proses menjadi bagian-bagian yang sewenang-wenang dan artifisial, tidak berguna untuk memahami proses pembuatan kebijakan. Mengingat hal ini, implementasi

dan pembuatan kebijakan pada dasarnya adalah proses yang sama. Sabatier dan Mazmanian mengadvokasi integrasi gagasan teoretis top-down dan bottom-up ke dalam enam persyaratan yang memadai dan penting untuk pelaksanaan yang efektif dari tujuan kebijakan yang tidak dinyatakan. Enam kondisi atau tuntutan berikut ini ialah:

- a. Tujuan yang spesifik dan tidak berubah yang dapat menjadi tolok ukur untuk menilai hukum dan sumber daya yang tersedia.
- b. Teori dan penalaran kausal yang cukup untuk memberikan pendekatan kebijakan gagasan yang masuk akal tentang bagaimana menerapkan modifikasi atau penggantian.
- c. Pembentukan organisasi yang mengikat secara hukum untuk membantu mereka yang melaksanakan kebijakan dan masyarakat sasarnya.
- d. Pelaksana yang berpengetahuan dan berkomitmen untuk menerapkan pengetahuan mereka untuk memajukan tujuan kebijakan.
- e. Bantuan dari organisasi advokasi dan “Penguasa” di lembaga legislatif dan eksekutif.
- f. Modifikasi saat keadaan sosial ekonomi yang tidak membahayakan dukungan organisasi dan otoritas atau mempertanyakan teori kausal yang memandu kebijakan.

2. Model Soren C. Winter

Model lain yang memukau yang pula tercantum pada jenis .generasi .ketiga ini .menarik .banyak minat. pakar merupakan intagrated model implementation yang dikemukakan oleh Winter (Suratman 2017:142). Mereka memandang imlementasi sebagai sesuatu yang tidak mandiri, mereka mengenalkan model yang tergabung. Dimana model yang tergabung ini menampilkan kalau

keberhasilan imlementasi ditentukan mulai dari perumusan hingga pada penilaian, Ini penting dengan sendirinya karena terdapat hubungan antara proses politik dan juga administrasi. Cara kebijakan diimplementasikan memiliki dampak signifikan pada bagaimana kebijakan itu dirancang. awalnya hadir atau ditetapkan oleh perumusan kebijakan itu sendiri. perihal lain yang juga berpengaruh adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat. Suatu kebijakan bisa menjadi lebih berpengaruh dengan area dimana kebijakan itu dilaksanakan.

Variabel-variabel .yang .mempengaruhi .proses .imlementasi .kebijakan adalah .sebagai .berikut:

1. Perilaku Hubungan Antar Organisasi

Komitmen dan kolaborasi antar organisasi adalah aspeknya. Untuk melaksanakan kebijakan publik dan mendapatkan hasil terbaik, kelompok tambahan sering terdaftar sebagai pendukung atau alat pelaksana di samping kelompok pelaksana kebijakan itu sendiri. Untuk mengubah perubahan kebijakan yang luas menjadi peraturan yang konkret, organisasi harus membentuk ikatan satu sama lain. Proses sosial yang berkelanjutan ini dapat menghasilkan arah kebijakan melalui tindakan.

2. Perilaku birokrat tingkat bawah.

kebijaksanaan adalah dimensinya. Tindakan para birokrat tingkat bawah adalah pemain utama dalam eksekusi kebijakan. Kapasitas untuk melaksanakan dan mengelola pilihan-pilihan penting dengan memanfaatkan pengaruh yang lebih kuat di luar otoritas resmi (diskresi) adalah tujuan di sini.

3. Perilaku Kelompok Sasaran Tujuan

kelompok memengaruhi kinerja birokrat atau pejabat tingkat bawah serta

hasil atau dampak kebijakan. Salah satu faktornya adalah apakah masyarakat mendukung atau menentang kebijakan tersebut, baik secara positif maupun negatif.

Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan kebijakan serta Prakarsa pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang dilakukan secara metodis, sengaja, dan berkoordinasi dengan swasta dan masyarakat. Pengetahuan ini menunjukkan bahwa kebijakan dan inisiatif untuk mengurangi kemiskinan secara teori bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan. Dua (dua) tujuan utama inisiatif penanggulangan kemiskinan pemerintah adalah:

1. Kebijakan yang mengutamakan membantu mereka yang termasuk dalam kelompok fakir miskin atau fakir miskin, baik muda maupun lanjut usia. Untuk pelayanan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan lain-lain, kelompok masyarakat ini perlu mendapat perhatian segera. Kebijakan pemerintah secara keseluruhan adalah memberikan bantuan langsung berupa BLT, BOS, Jamkesmas, dan Raskin.
2. Kebijakan yang mengutamakan membantu mereka yang termasuk dalam kelompok fakir miskin atau fakir miskin, baik muda maupun lanjut usia. Untuk pelayanan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan lain-lain, kelompok masyarakat ini perlu mendapat perhatian segera. Kebijakan pemerintah secara keseluruhan adalah memberikan bantuan langsung berupa BLT, BOS, Jamkesmas dan Raskin.

Sebagaimana dipaparkan dalam Perpres Nomor. 15 Tahun 2010 tentang Program

Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Menurut karakteristik penerima, mereka bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut :

1. Kumpulan program perlindungan sosial yang difokuskan pada orang, keluarga, atau rumah tangga yang berupaya menegakkan hak-hak dasar, meringankan beban keuangan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu. Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Beras Keluarga Miskin (Raskin), dan Program Beasiswa Pendidikan Keluarga Miskin (BSM) adalah beberapa inisiatif nasional dalam kategori ini.
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), program nasional dalam kelompok ini adalah Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan, yang berbasis pada pemberdayaan kelompok masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam perkembangan.

KONSEP KEMISKINAN

Kemiskinan

Permasalahan sosial yang sering kali muncul di sekitar masyarakat ialah kemiskinan. Terlebih khusus juga di negara berkembang. Di dalam ruang lingkup rakyat Indonesia permasalahan kemiskinan pula ialah permasalahan sosial yang sangat penting untuk di teliti lebih lanjut atau lebih mendalam. Kemiskinan merupakan ketidakcapaian seseorang dalam melengkapi kebutuhan-kebutuhan dasar, agar memiliki kehidupan yang layak (BPS dan Depsos). Bagi Agus Sjaafari (2014: 12), Saat ini, strategi

atau tindakan tersebut merupakan paradigma untuk mengurangi kemiskinan. Strategi anti kemiskinan ini pasti akan berhasil apabila masyarakat yang miskin menjadi aktor utama dalam perang melawan kemiskinan. Demi menolong masyarakat kalangan miskin keluar dari lingkaran kemiskinan diperlukan kepedulian,

komitmen, kebijaksanaan, organisasi, serta kegiatan yang tepat. Dibutuhkan juga perilaku yang tidak memperlakukan orang miskin sebagai obyek, namun subyek. David Cox (Sjafari, 2014: 17) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan kejadian yang sangat kompleks. Kemudian dia membagi kemiskinan ke dalam 4 dimensi, yaitu :

- a. Kemiskinan yang disebabkan oleh globalisasi. Globalisasi menciptakan pemenang dan pengalah. Pemenang biasanya merupakan negara-negara maju. Di dalam negara-negara berkembang kadang kala seseorang yang kurang mampu lebih tersudutkan oleh persaingan serta pasar bebas yang mana ialah prasyarat globalisasi.
- b. Kemiskinan yang berhubungan dengan pembangunan. Kemiskinan yang terjadi dikarenakan kurangnya pembangunan, peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan, serta akibat kecepatan perkembangan perkotaan.
- c. Kemiskinan sosial. Kemiskinan ini dirasakan oleh perempuan, anak-anak, serta kelompok minoritas.
- d. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain ataupun faktor-faktor eksternal di luar si miskin, semacam konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, serta tingginya jumlah penduduk.

Penyebab Kemiskinan

(Todaro 2006), memperlihatkan jalinan antara kemiskinan serta keterbelakangan bersama beberapa aspek ekonomi serta aspek

non ekonomi. Tiga komponen utama selaku pemicu keterbelakangan serta kemiskinan warga, aspek tersebut merupakan kurangnya taraf hidup, kurangnya rasa percaya diri serta terhindar dari kebebasan. ketiga faktor tersebut mempunyai ikatan timbal balik. Kurangnya taraf hidup diakibatkan karena kurangnya pemasuka, dan kurangnya pemasukan diakibatkan karena kurangnya tingkatan produktivitas tenaga kerja, kurangnya produktivitas tenaga kerja diakibatkan karena menlonjaknya perkembangan tenaga kerja, naiknya angka pengangguran serta kurangnya investasi perkapita. Naiknya angka pengangguran diakibatkan karena naiknya tingkat perkembangan tenaga kerja, serta kurangnya investasi perkapita, serta naiknya perkembangan tenaga kerja diakibatkan karena penyusutan tingkat kematian serta kurangnya investasi perkapita yang diakibatkan karena tingginya ketergantungan kepada teknologi asing yang hemat tenaga kerja. Lalu kurangnya tingkatan pemasukan berdampak kepada tingkatan kesehatan, peluang pembelajaran, perkembangan tenaga kerja dan investasi perkapita.

faktor kemiskinan disebabkan karena mereka tidak mempunyai aspek pencipta sendiri, tingkatan pendidikan/pembelajaran pada umumnya rendah, banyaknya diantara mereka yang tidak mempunyai fasilitas serta diantara mereka berusia relatif muda dengan tidak memiliki tingkat pendidikan/pembelajaran serta keahlian yang mencukupi. Kemiskinan pula diakibatkan oleh sikap masyarakat yang malas, dan tidak ingin bekerja keras, sedangkan keadaan alamnya mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Terlebih lagi bila pemerintahannya melaksanakan perilaku yang merugikan negaranya sendiri semacam korupsi, sebab dengan terdapatnya pemerintahan yang korupsi maka tidak terjadi sebuah pemerataan

kekayaan di dalam negara itu sendiri (Supriatna 1997).

Karakteristik Kemiskinan

Kemiskinan dapat diukur dengan menggunakan garis kemiskinan, yaitu suatu standar yang menentukan batas atas seseorang yang dianggap miskin jika dilihat dari sudut konsumsi (Supriatna 1997). Garis kemiskinan adalah ukuran yang menentukan jumlah pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan pokok dan bukan makanan. Seseorang dianggap miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Mereka yang berpenghasilan kurang dari Rp 7.057 per orang per hari dianggap berada di bawah tingkat kemiskinan masyarakat. Garis kemiskinan yang meliputi kebutuhan pangan dan non pangan lebih dari angka Rp. 7.057 per orang per hari. Namun, kemiskinan, menurut Word Bank (2000), adalah persoalan lain.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan jenis yang digunakan dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk memberikan jawaban atas kekhawatiran tentang penerapan kebijakan program pengentasan kemiskinan di Desa Molompar Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang di temukan di lapangan. Agar bisa menjadi instrument, maka dari itu peneliti harus mempunyai bekal teori dan wawasan yang luas agar supaya peneliti mampu untuk memberikan pertanyaan, menyusun teori-teori, menganalisis, mengambil dokumentasi, menarik kesimpulan dan juga mengkonstruksi situasi sosial yang akan diteliti dengan jelas dan bermakna untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu fenomena sosial yang akan di teliti (Sugiyono, 2016: 4-6)

Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka dari itu yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni bagaimana implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Desa Molompar Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji keefektifan program yaitu menurut George C. Edward III dengan 4 indikator sebagai berikut :

1. Komunikasi, dilihat dari sejauh mana informasi kegiatan yang di lakukan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
2. Sumber Daya, dilihat dari berbagai sumber daya yang menjadi pendukung dan dapat mempengaruhi seberapa baiknya suatu kebijakan diimplementasikan agar terwujudnya kebijakan yang akan dilakukan pemerintah.
3. Disposisi/Sikap, dilihat dari sikap pembuat kebijakan dimana sikap dari pelaksana kebijakan sangatlah utama pada proses implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan.
4. Struktur Birokrasi, dilihat dari bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kelompok dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai implementor dalam sebuah kebijakan. agar nantinya program implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang akan dilaksanakan bisa berjalan dengan efisien dan sesuai dengan syarat dan aturan yang telah ditetapkan.

Informan Penelitian

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini berdasar pada asas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi yang akurat, lengkap dan bisa dipercaya. Maka dari itu peneliti mengambil

informan penelitian berjumlah 8 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Hukum Tua Desa Molompar
2. Kepala Jaga Desa Molompar
3. Sekertaris Desa Molompar
4. Bendahara Desa Molompar
5. Ketua BPD Desa Molompar
6. Wakil Ketua BPD Desa Molompar
7. Masyarakat

Hasil Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yang terdiri dari 4 indikator penelitian. Dan hasil yang di dapat dengan menggunakan teori tersebut yakni sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi menjadi bahan yang begitu penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Seperti implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang dilakukan di Desa Molompar Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. Seluruh informan dalam penelitian ini kurang setuju bahwa komunikasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan ini sudah cukup baik. Di lihat dari sisi pemberian informasi dan pendataan nama-nama keluarga penerima bantuan sudah jelas dijabarkan bahwa masih saja terdapat kendala dan kesalahan terkait pemberian informasi dan pendataan nama-nama keluarga penerima kebijakan bantuan tersebut di mana informasi sering kali tidak sampai kepada masyarakat yang terdaftar dalam keluarga penerima bantuan dan data-data yang diambil tidak sepenuhnya sesuai dengan realita keluarga penerima bantuan tersebut dimana keluarga yang sebenarnya tergolong dalam keluarga berkecukupan terdaftar dalam data penerima bantuan, sedangkan keluarga yang tergolong kurang

mampu tidak terdaftar dalam data penerima bantuan. sementara itu jika dilihat dari sisi pelaksanaan kebijakan juga sama, yaitu masih saja terdapat kekurangan di mana ketika kebijakan sedang di jalankan para pelaksana sering mengalami kesalahan dalam pembagian bantuan-bantuan yang diberikan. Lagi-lagi hal tersebut diakibatkan karena kesalahan dalam komunikasi yang di jalankan sehingga berdampak pada program implementasi kebijakan tersebut.

b. Sumber Daya

Pada implementasi kebijakan ini terdapat beberapa sumber daya pendukung terwujudnya kebijakan yang akan dilakukan pemerintah. Dalam wawancara yang dilakukan di atas para informan mengatakan jika di lihat dari sisi SDM (Sumber Daya Manusia) belum cukup efisien yang mana ketepatan serta kelayakan antara jumlah orang yang dibutuhkan serta bakat yang dimiliki tiap-tiap orang dalam program implementasi kebijakan tersebut belum sesuai dengan tugas dan pekerjaan yang ditangani. Dilihat dari sisi SDA (Sumber Daya Anggaran) juga belum cukup baik yang mana, anggaran yang dibutuhkan untuk membayar operasional pembuat kebijakan tersebut tidak sesuai dengan target yang ditetapkan hingga mempengaruhi kesuksesan pembuatan kebijakan dan kegiatan tidak bisa dilakukan dengan optimal. Sementara di sisi SDP (Sumber Daya Peralatan) cukup efektif dimana sudah tersedia fasilitas gedung untuk dijadikan tempat pelaksanaan program, dan sarana lain yang sudah disediakan sehingga mempermudah dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

c. Disposisi

Disposisi ialah sikap dari pembuat kebijakan agar bisa melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh agar tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Menurut para informan sikap dari pelaksana kebijakan sangatlah utama pada proses implementasi kebijakan

pengentasan kemiskinan, karena Sikap dari pelaksana kebijakan program sangat berpengaruh atas keberhasilan suatu program yang akan dilakukan apalagi program tersebut mengenai pengentasan kemiskinan. sikap yang seharusnya ditunjukkan pelaksana kebijakan di mana dalam setiap penerapan kebijakan, para pelaksana patut menunjukkan sikap yang mampu memimpin jalannya program sehingga dapat terlaksana dengan baik, karena keberhasilan program kebijakan pengentasan kemiskinan juga ditentukan oleh faktor disposisi yang berhubungan dengan sikap dan komitmen dari pelaksana program sebagai faktor penentu jalannya suatu kebijakan yang akan diterapkan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ialah salah satu unsur dalam implementasi kebijakan yang memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kelompok dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai implementor dalam sebuah kebijakan. Dari pendapat para informan di atas menyatakan bahwa struktur birokrasi berperan penting dalam proses penyusunan tugas-tugas serta tanggung jawab yang akan diberikan kepada tiap-tiap lembaga dalam melakukan tugas mereka seperti mengelola suatu program yang sudah diberikan, pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaannya, agar nantinya program implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang akan dilaksanakan bisa berjalan dengan efisien dan sesuai dengan syarat dan aturan yang telah ditetapkan. Akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi apalagi berkaitan dengan implementasi pengentasan kemiskinan tersebut, dimana kegiatan program lebih menekankan kepada kepentingan birokrasi dibanding kepentingan kelompok masyarakat miskin. Meskipun keputusan-keputusan ataupun aturan-aturan program sudah dilakukan perubahan yang mana lebih mengutamakan kepentingan kelompok

masyarakat miskin, tetapi birokrasi terlihat lebih mengutamakan aktivitas dan kebijakan program. Hal itulah yang kemudian mengakibatkan kurangnya kesesuaian hasil program yang nyata dari kelompok masyarakat miskin, sampai akhirnya berakibat kepada kurangnya tingkat kesuksesan/keberhasilan dari pelaksanaan program pengentasan kemiskinan tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Desa Molompar Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan menggunakan 4 indikator penilaian Implementasi Kebijakan dari George C. Edward III, maka di dapatkan kesimpulan dengan uraian sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dilihat dari indikator Komunikasi, dapat di simpulkan bahwa komunikasi masih mengalami hambatan setiap kali melaksanakan kebijakan, di mana tingkat pengawasan, tata kelola manajemen pemerintah, pola pikir kinerja organisasi komunikasi yang dilakukan pemerintah ketika menjalankan kebijakan pengentasan kemiskinan ini belum maksimal/belum efektif karena masih saja terjadi miskomunikasi antara pelaksana kebijakan sehingga informasi mengenai data-data para penerima bantuan tidak sepenuhnya sesuai dengan realita masyarakat penerima bantuan.
2. Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dilihat dari indikator Sumber daya, dapat di simpulkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) belum juga sepenuhnya maksimal atau terlaksana dengan baik karena masih banyak masyarakat yang tidak mau memanfaatkan sumber daya manusia

yang ada untuk berinovasi, agar bisa menghasilkan produk atau usaha.

3. Implementasi Kebijakan Pengantasan Kemiskinan dilihat dari Indikator Disposisi/Sikap, dan dapat di simpulkan bahwa Disposisi/Sikap yang dimiliki para pelaksana kebijakan belum juga baik sehingga masih saja terjadi kesalahan dalam menerangkan jalannya kebijakan program bantuan sampai berdampak pada masyarakat yang hendak menerima program bantuan tersebut.
4. Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dilihat dari indikator Struktur Birokrasi, dapat di simpulkan bahwa Struktur Birokrasi masih kurang efisien sehingga diperlukan peninjauan kembali atas aturan dan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan pelaksana kebijakan sebelumnya.

Saran

Sebagaimana hasil penelitian dan kesimpulan yang dijelaskan di atas, maka beberapa saran yang dapat direkomendasikan untuk Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Desa Molompar Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut :

1. Harus lebih konsisten lagi dalam memberi informasi terkait program-program yang akan disalurkan kepada masyarakat terlebih lagi program mengenai bantuan-bantuan, disarankan komunikasi harus akurat dan di mengerti agar bisa di cermati oleh para pelaksana dan juga masyarakat.
2. Diharapkan pemerintah segera menyusun strategi untuk dapat merubah pola pikir masyarakat desa setempat entah dengan cara memotivasi atau melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan sumber daya agar supaya mereka dapat memanfaatkan sumber daya yang ada

sehingga bisa membantu meningkatkan kualitas diri mereka agar bisa keluar dari rona kemiskinan.

3. Para pelaksana kebijakan program patutnya menunjukkan sikap sebagai implementor saat hendak menjalankan sebuah program bantuan agar terlihat tidak hanya bertindak menurut kepentingan sendiri tetapi juga untuk kepentingan masyarakat penerima program bantuan tersebut.
4. Agar tidak terjadi kembali hambatan dalam pelaksanaan kebijakan program pengentasan kemiskinan, maka harus lebih ditingkatkan lagi pengawasan terhadap aturan dan keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan sebelumnya dan juga mengendalikan dengan sebaik-baiknya tata kelola manajemen pemerintah, pola pikir kinerja organisasi dan komunikasi birokrasi terhadap suatu program yang akan dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Malik, A. (2012) Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan). Skripsi: Ilmu Pemerintahan Malang Fakultas Ilmu Sosial dan Politik; Universitas Muhammadiyah.
- Agustino (2016) *Dasar-dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta
- Sjafari, A. (2014) *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Anderson (Abidin, 2012) *Kebijakan Publik*. Jakarta, Penerbit Salemba Humanika.
- Aneta, A. (2010) *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan*

- Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo*. Jurnal: Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo.
- Badan Pusat Statistik (2016) *Statistik Indonesia*. Buku: Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia.
- BPS dan Depsos (2002) *Penduduk Fakir Miskin Indonesia*. Jakarta, BPS.
- Bappenas (2017) *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan*
- Browne dan Wildavsky. (2004) *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Solihin, D. (2014) *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta, Buku : Yayasan Empat Sembilan.
- David Cox (Sjafari, 2014) *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*, Yogyakarta. Penerbit : Graha Ilmu.
- Van Meter, S. D. dan Van Horn, E. C. (2016) *Dasar-dasar Kebijakan Publik. Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta
- Eston (Tangkilisan, 2003) *Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam Kebijakan Publik yang Membumi*: Yogyakarta. Lukman Offset dan YPAPI,
- Fermana (2009) *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis*: Jogjakarta. Ar-Ruzz Media.
- Sopah, F. Kusumawati, W. dan Wahyudi, E. K. (2020) *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Ilmiah No.6 Vol.2 ISSN : 2684-6853
- Edward, C. G III (1980) *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia AIPI.
- Pono, H. Lengkong, F.D.J. Palar, N. (2022) *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Apulea Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara*. Jurnal: Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik: Universitas Sam Ratulangi. No.116 Vol.8
- Ajaiwala, G. L. Rompas, W. Y. Tulusan, F. M. G. (2021) *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*. Jurnal: Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik: Universitas Sam Ratulangi. No.104 Vol.VII ISSN: 2338-9613
- Miles, Huberman, Sugiono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Buku : Penerbit Alfabeta.
- Taufik, M. Sugiharto, I. (2019) *Implementasi Kebijakan Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Tegal*. Jurnal: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti. No.2 Vol.7 ISSN: 2655-3449. <http://www.diktum.upstegal.ac.id>
- [Nugroho \(2014\) Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang](#). Jakarta: Pustaka Belajar
- Parson (2001) *PUBLIC POLICY Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta; Kencana Prenada Media Grup.
- Suciana, P. Dayat, U. Gun Gun, G. (2022) *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat (Studi Deskriptif di Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur)* Jurnal: Ilmiah Wahana Pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang.No.7 Vol.8 ISSN: 2089-5364. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>

- Kinontoan R. F. Posumah, J. & Plangiten, N. (2022) *Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Bolangitan Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara* Jurnal: Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik: Universitas Sam Ratulangi. No.113 Vol.8 ISSN: 2338-9613
- Ani, S. (2018) *Implemetasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Donri Kabupaten Soppeng)*. Skripsi: Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik: Makasar. Universitas Muhammadiyah.
- Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung Buku : Penerbit Alfabeta
- Suharto (2005) *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Supriatna (1997) *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta. Jurnal : Rineka Cipta.
- Suratman (2017) *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Suryana (2018) *Pengembangan Kewirausahaan untuk Pemberdayaan UKM Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Surmayadi (2005) *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama Pertama.
- Syaukani dkk (2004) *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Todaro (2006) *Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I)* Jakarta. Jurnal : Erlangga
- Tumbel R, kiyai B, Mambo R. (2021) dengan Judul “Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa”. Jurnal Administrasi Publik (JAP).
- Girsang, W. (2011) *Kemiskinan Multidimensional di Pulau-pulau kecil*. Ambon: Badan Penerbit Fakultas Pertanian; Universitas Pattimura.